



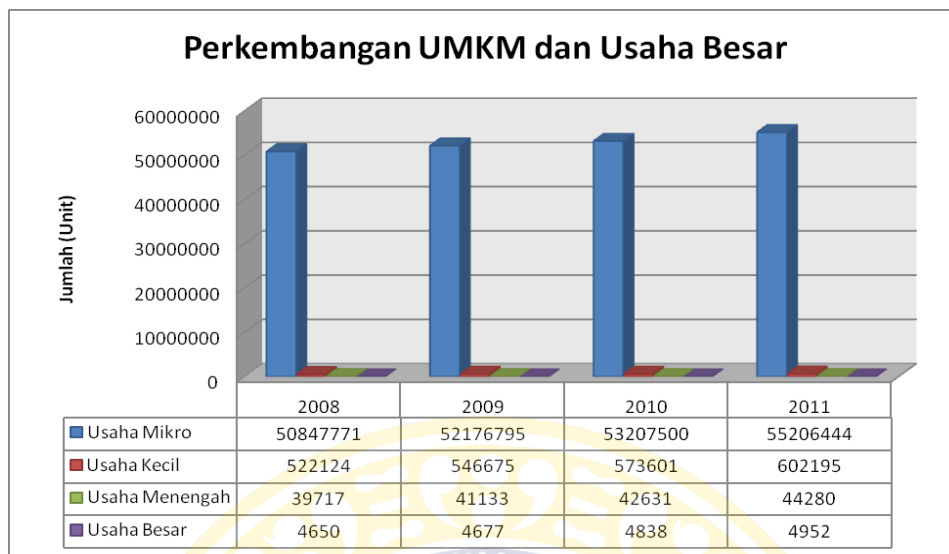
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sudah seringkali dinyatakan di dalam banyak seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, dan media massa bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting, terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini tentu tidak tanpa alasan. Fakta menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok UMKM tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh Usaha Besar. Hal ini didukung dengan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, besarnya proporsi PDB dari sektor UMKM mencapai 56% dengan jumlah kurang lebih 242.890 unit UMKM dengan tingkat penyerapan tenaga kerja diatas 97% (Badan Pusat Statistik, 2010). Oleh karena itu, UMKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan secara optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat terus setiap tahunnya. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah selama ini untuk memerangi kemiskinan (Tambunan, 2009:46).

Keadaan ini menjadikan sektor UMKM sebagai sektor yang sangat penting bagi penggerak pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia, seperti data yang disajikan pada gambar I.1 berikut ini



Gambar 1.1

Perkembangan UMKM dan Usaha Besar

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (<http://www.dekop.go.id>)

Tabel I.1

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010 – 2011

No	Indikator	Satuan	Tahun 2010		Tahun 2011		Perkembangan tahun 2010-2011	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Unit Usaha	(Unit)	58.828.569		55.211.396		1.382.827	2,57
	a. UMKM		58.823.732	99,99	55.206.444	99,99	1.382.713	2,57
	b. Usaha Besar		4.838	0,01	4.952	0,01	114	2,35
2	Tenaga Kerja	(Orang)	102.241.486		104.613.681		2.372.196	2,32
	a. UMKM		59.401.775	97,22	101.722.458	97,24	2.320.683	2,33
	b. Usaha Besar		2.839.711	2,78	2.891.224	2,76	51.513	1,81
3	PDB atas dasar harga berlaku	(Rp. Milyar)	6068.762,8		7.427.086,1		1.358.323,3	22,38
	a. UMKM		3466.393,3	57,12	4.303.571,5	57,94	587.178,2	24,15
	b. Usaha Besar		2602.369,5	42,88	3.123.514,6	42,06	521.145,1	20,03
4	PDB atas dasar harga konstan	(Rp. Milyar)	2217.947,0		2.377.110,0		159.163,0	7,18
	a. UMKM		1282.571,8	57,83	1.369.326,0	57,60	86.754,2	6,76
	b. Usaha Besar		935.375,2	42,17	1.007.784,0	42,40	72.408,8	7,74

Sumber: <http://www.dekop.go.id>



Berdasarkan gambar dan tabel diatas dapat dilihat perkembangan UMKM dan Usaha Besar dari tahun 2008 sampai tahun 2011, dimana akhir tahun 2011 terdapat sekitar 55.206.444 unit UMKM atau sebesar 99,99% dari seluruh usaha di Indonesia dibandingkan dengan Usaha Besar. Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja sekitar 97,24% dan sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 57,83%. Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa jumlah unit UMKM mengalami pertumbuhan dari tahun 2010 hingga 2011 sebesar 2,57%. Selain itu, diketahui bahwa UMKM lebih mendominasi dibandingkan dengan Usaha Besar. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan salah satu sektor faktor pendukung yang menopang perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan melalui sektor ini semua aspek yang berkaitan dengan pola kehidupan manusia dari mulai sektor konsumsi, pangan, papan.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi dan UMKM pada tahun 2011-2013 menyatakan bahwa UMKM masih menjadi pelaku mayoritas dalam bidang usaha yakni terdapat peningkatan sebesar 2,41 % dari 55.206.444 unit usaha pada tahun 2011 menjadi 56.534.592 unit usaha pada tahun 2012 atau 99% dari pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Dan kurun waktu tahun 2011-2012 jumlah PDB UMKM terdapat peningkatan sebesar 12,67% dari Rp 4.321.830 Milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 4.869.568 Milyar pada tahun 2012. Sedangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan sektor UMKM akan tumbuh



sekitar 25% pada tahun 2012 dibandingkan prediksi tahun 2011 yang berkisar 15-20%.

Melihat kenyataan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia terdapat di pedesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan sebagai motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang berarti juga mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. UMKM di pedesaan dapat berperan sebagai pendorong diversifikasi kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian (Tambunan, 2009:46).

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang bisnis, atau perekonomian itu sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dimana regulasi yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, juga bisa disebut sebagai landasan hukum dalam dunia UMKM, karena tujuan dari adanya regulasi tersebut adalah melindungi para pelaku usaha khususnya yang masih bergelut pada bagian Mikro, Kecil dan Menengah. Seperti yang terdapat pada pasal 8, 9 dan 10 pada bab 5 Undang-Undang tersebut, para pelaku usaha tersebut juga mendapatkan bantuan dari pemerintah diberbagai aspek antara lain aspek pendanaan dan juga aspek sarana prasarana dan masih banyak hal yang teratur dalam UU No. 20 Tahun 2008 sebagai landasan hukum bisnis bagi UMKM.

Dari total 33 provinsi di Indonesia, Jawa Timur masih merupakan satu-satunya provinsi yang sektor UMKM-nya memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian daerah. Jumlah industrinya 54,34%



berasal dari UMKM dan mampu menampung 98% tenaga kerja, sehingga selain mensejahterakan pelaku UMKM, juga membantu pemerintah dalam pengentasan pengangguran. Jumlah UMKM di wilayah Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai 4,2 juta UMKM, dimana 85,09% merupakan usaha mikro; 14,19% merupakan usaha kecil; 0,57% usaha menengah dan hanya 0,15% berupa usaha skala besar. Usaha sektor UMKM telah membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 53,4% atau setara dengan Rp 415,7 triliun, oleh karena itu sektor UMKM memiliki peranan yang strategis bagi perekonomian di Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2011).

Kabupaten Sidoarjo yang berada di Provinsi Jawa Timur, ternyata juga memiliki jumlah UMKM paling banyak. UMKM kerajinan dan kuliner ribuan tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu kerajinan yang khas dari Sidoarjo yaitu Batik Tulis Sidoarjo. Batik merupakan ciri khas dari kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur yang sangat dalam dan memiliki nilai historis yang cukup panjang. Kesenian batik yang dikenal sejak akhir abad ke-18 pada zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga kerajaan-kerajaan berikutnya, hingga saat ini pun masih dilestarikan oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu perkembangan kesenian batik di Indonesia dipengaruhi oleh penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa literatur mengatakan pengembangan batik paling banyak dilakukan pada masa kerajaan Mataram, kemudian kerajaan Solo dan Yogyakarta sekitar abad ke-



17, 18, dan 19 (Aep S. Hamidin, 2010:8). Batik adalah seni menggambar di atas kain yang digunakan sebagai pakaian dan menjadi kebudayaan keluarga raja pada zaman dahulu. Pada awalnya batik dikerjakan hanya dalam lingkungan kerajaan saja dan hasilnya digunakan untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Seiring berjalannya waktu, pembuatan batik mengalami perkembangan dan pembuatannya tidak hanya dalam lingkungan kerajaan melainkan meluas ke kalangan rakyat dan menjadi suatu pekerjaan bagi masyarakat.

Meluasnya batik menjadi pekerjaan bagi masyarakat dimulai dari masa peperangan melawan tentara kolonial Belanda pada sekitar abad ke-17. Hal tersebut tidak lepas dari banyak pembatik dari dalam keraton yang keluar dari keraton karena enggan melakukan kerjasama atau menjadi pembatik untuk Belanda. Berakhirnya perang Diponegoro juga menjadi salah satu penyebab banyaknya keluarga keraton yang berpindah, seperti ke daerah Yogyakarta dan Solo serta ke daerah lainnya di pulau Jawa. Keluarga keraton yang membawa pengikutnya (termasuk seniman batik) menyebarkan kesenian batik di daerah baru. Hal tersebut memberikan perkembangan kerajinan batik dan memberikan mata pecaharian bagi keluarga keraton.

Berawal dari beberapa hal di atas, batik akhirnya banyak tersebar dan berkembang ke seluruh daerah di Jawa bahkan di seluruh pulau-pulau di wilayah Indonesia. Salah satunya di Jawa Timur. Perkembangan batik di Jawa Timur yang sudah berkembang adalah batik Gedog di Tuban dan batik



gentongan di Madura, selain itu ada pula batik Jetis di Sidoarjo. Namun sayangnya perkembangan batik di Sidoarjo belum sepesat dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, seperti Tuban dan Madura. Padahal Sidoarjo jauh lebih dekat dengan kota metropolis di Jawa Timur yakni Surabaya dan merupakan bagian dari kerajaan Majapahit pada masa lalu yang tidak lepas dari seni kerajinan batik.

Dalam perjalanannya, batik Sidoarjo juga memiliki historis yang cukup panjang. Salah satu batik yang terkenal di Sidoarjo adalah Batik Jetis. Batik Jetis Sidoarjo sudah ada sejak tahun 1675. Batik tersebut dibawa oleh mbah Mulyadi, beliau adalah salah satu keturunan dari Raja Kediri. Mbah Mulyadi mengajarkan teknik membatik kepada masyarakat sekitar khususnya masyarakat di Jetis. Pada akhirnya banyak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membatik di Jetis (Bagian Adm. Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo, 2012). Perkembangan batik Jetis mulai terlihat pada tahun 1956 (<http://fieyanh.wordpress.com/artikel/budaya-nusantara> diakses pada tanggal 18 Februari 2015). Dengan ditandai berdirinya perusahaan milik Ny. Wida. Dari usaha beliau, pengrajin batik mulai banyak bermunculan dan membuat unit usaha di sekitarnya. Pada tahun 1970-an perkembangan batik Jetis terus berlanjut. Hal tersebut dikarenakan bekal keahlian yang didapatkan sebelumnya. Pada waktu itu masyarakat Jetis pekerja Ny. Wida mulai membuka usaha batik mereka sendiri. Dari sinilah usaha batik mulai menjadi usaha rumahan (*home*



industry) di Jetis. Usaha tersebut kemudian juga menjadi mata pencaharian utama masyarakat Jetis selama bertahun-tahun hingga sekarang.

Pada tahun 1990-an usaha batik Jetis mengalami penurunan. Faktor pemicu utamanya adalah dikarenakan harga kebutuhan pokok sebagai bahan baku batik semakin melonjak dan munculnya batik cap atau batik sablon. Sulitnya untuk mengelola bahan baku dengan harga yang terjangkau menjadikan banyak pengrajin yang kesulitan untuk mengelola modal sehingga banyak pengrajin yang mengalami kematian usaha. Selanjutnya, adanya batik cap atau sablon dengan pembuatan yang cepat dan tidak memakan waktu lama dengan corak yang sama. Oleh karena itu permintaan batik cap semakin tinggi dari para pembeli yang imbasnya banyak pengrajin batik di Jetis gulung tikar.

Pada perkembangannya saat ini usaha batik Jetis terus bertahan dan menjadi mayoritas tulang punggung perekonomian masyarakat Jetis. Ironisnya, sejak tahun 1995 hingga awal tahun 2008, para pengrajin batik dan pengusaha batik di Jetis berjalan sendiri-sendiri baik proses produksi hingga pemasaran. Hambatan muncul ketika maraknya batik dari luar Jetis semakin menambah persaingan pasar antara pengrajin batik di Jetis. Pada akhirnya para pemuda kampung Jetis berinisiatif untuk membuat sebuah paguyuban untuk para pengrajin batik yang bernama Paguyuban Batik Sidoarjo (PBS).

Pada awal Februari 2008 PBS resmi berdiri. Tujuan utama dari PBS tersebut adalah untuk menginisiasi jumlah pengrajin yang masih tersisa dan



mengakomodasi kebutuhan para pengrajin batik tulis sehingga tidak terjadi penurunan dalam jumlah yang signifikan. Setelah PBS berdiri Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan efek positif dengan meresmikan daerah Jetis sebagai kampung batik dengan nama resminya “Kampung Batik Jetis”. Dengan demikian peresmian Jetis sebagai “Kampung Batik Jetis Sidoarjo” oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan bisa membangkitkan kembali kejayaan Jetis sebagai salah satu daerah penghasil batik berkualitas khas Sidoarjo. Usaha yang dilakukan Paguyuban dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap perkembangan kampung Batik Jetis memberikan hasil yang positif bagi perkembangan batik jetis pada waktu itu. Setelah adanya pengakuan tersebut, penjualan batik Jetis mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hingga saat ini yang tergabung dalam PBS ada 28 anggota pengrajin batik tulis Jetis (Bagian Adm. Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo, 2012).

Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sangat positif dalam membantu peningkatan penjualan batik Jetis. Hal tersebut ditunjukkan dengan kebijakan yang mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memakai pakaian batik setiap hari Kamis dan Jumat. Peningkatan penjualan batik ternyata tidak bertahan cukup lama pada pertengahan tahun 2010 banyak pengrajin batik yang gulung tikar dan memilih untuk tidak meneruskan pekerjaan sebagai pengrajin batik di Jetis (<http://id.indonesian-craft.com/article/49/dekranasda> diakses pada tanggal 18 Februari 2015). Sebagai salah satu aspek ekonomi rakyat di Sidoarjo,



seharusnya kampung batik Jetis bisa menjadi acuan sebagai unit usaha yang berdaya. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah kontradiksi di mana ketika permintaan batik cukup tinggi namun jumlah pengrajin batik justru mengalami penurunan dari 40 pengrajin tinggal 28 pengrajin, itupun tidak semuanya aktif memproduksi (Wawancara dengan Ketua PBS Nurul Huda, 23 Februari 2015). Penurunan jumlah pengrajin ini merupakan ancaman dalam eksistensi Jetis sebagai Kampung Batik pertama di Sidoarjo. Hal tersebut seakan menjadi sebuah pisau yang bermata dua bagi batik Jetis.

Unit usaha kerajinan batik adalah salah satu aspek ekonomi yang termasuk ke dalam masyarakat, khususnya golongan menengah dan bawah dalam usaha mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Membuat kerajinan batik merupakan mata pencaharian utama mayoritas warga Jetis. Selain untuk melestarikan budaya Indonesia, membuat kerajinan batik dapat menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan kewirausahaan dalam menanggulangi kemiskinan serta pencapaian kesejahteraan sosial. Batik merupakan salah satu aspek kebudayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini juga masih aktual sesuai dengan tujuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri yang menginginkan kebangkitan ekonomi rakyat Sidoarjo dapat pulih kembali pasca kejadian lumpur lapindo 2006 silam dengan semangat ekonomi kerakyatan. Tentu saja semangat ekonomi kerakyatan tersebut direalisasikan dengan bentuk UMKM, di mana kampung batik Jetis menjadi salah satu dari beberapa kampung wisata yang



berbentuk UMKM di Sidoarjo yang dijadikan sebagai sarana pembangkit perekonomian rakyat di Sidoarjo. Dengan telah bergulirnya liberalisasi perdagangan tersebut Paguyuban batik seakan ditantang untuk menjaga bagaimana mempertahankan eksistensi para pengrajin batik tulis di Sidoarjo yang menjadi salah satu pionir batik tulis di Jawa Timur sejak abad ke-18.

Dalam pengembangannya, batik tidak lagi dipakai untuk pakaian sehari-hari kerajaan dan lingkungan keraton. Batik juga berkembang menjadi budaya baru bagi banyak golongan dan juga multietnis seperti masyarakat Tionghoa dan Melayu. Batik berkembang menjadi sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Dahulu jika batik hanya dipakai sebagai “tapih”, “dodot”, “kemben”, “selendang”, “daster”, dan “sarung”. Zaman modern ini batik juga dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang baru. Pada akhirnya batik tidak lagi dipandang sebagai media tradisional dan dimodifikasi untuk menjadi budaya modern (rok, blazer, kemeja, dan jas), elemen interior (taplak meja, sprei, gorden), produk cinderamata (kipas, sandal, kartu pos), media ekspresi (lukisan) dan lainnya. Batik tidak hanya menjadi sebuah kebudayaan melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dari berbagai aspek, mulai dari corak dan proses pembuatan. Batik juga tidak luput untuk dijadikan komoditi perdagangan, mulai dari sentra UMKM hingga industri besar. Hal tersebut nampak dari banyaknya masyarakat yang menggunakan batik untuk dijadikan sebagai mata pencaharian.



Penelitian mengenai batik ini menjadi menarik dan penting, karena pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO sebagai badan kebudayaan dunia yang berada di naungan PBB mengakui batik sebagai warisan tak benda dunia dari Indonesia. Langkah Pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan Batik sebagai warisan budaya asli Indonesia tak lepas dari ulah Malaysia yang mengklaim batik sebagai kepunyaan Malaysia pada brosur wisata pariwisata negara.

“Baru-baru ini pertengkaran sengit terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Pemicunya adalah klaim Malaysia terhadap batik sebagai penemuan mereka. klaim itu di terbitkan di media internasioanl dan dicetak pada brosur pariwisata Negara. Klaim memicu kemarahan publik Indonesia. Malaysia juga mengklaim pada penciptaan tari tradisional lainnya, beberapa seperti tari pendet dari Bali yang membuat pertengkaran semakin meradang.”
(Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2010:281)

Setelah melalui perjalanan yang tidak mudah usaha Pemerintah Indonesia untuk mematenkan batik sebagai warisan budaya Indonesia memberikan hasil positif. Hal tersebut ditandai dengan diresmikannya batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2 Oktober 2009. Adapun bagian isinya sebagai berikut:

“Warisan budaya tak berwujud yang mengacu praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan (termasuk instrumen, objek, artefak dan ruang budaya), bahwa komunitas, kelompok dan dalam beberapa kasus, individu mengakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka.”
(Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2010:288)

Mengingat Batik sudah menjadi ikon Indonesia di kancah internasional maka menjadi hal penting bagi pemerintah untuk membantu



melestarikan budaya yang sudah diakui tersebut. Dinas terkait yang menjadi pendukung dalam pengelolaan UMKM khususnya Batik Jetis adalah Diskoperindag dan ESDM Sidoarjo. Pemerintah melalui Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo melakukan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh industri kecil batik di Kampung Batik Jetis. Apabila ditinjau dari peran pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, maka sudah jelas bahwa perlunya peran pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil agar tetap berperan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang semakin baik dan seimbang. Sehingga dalam hal ini, upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah melalui Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo adalah dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.

Hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Kumalasari dkk (2014) yang meneliti tentang pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo untuk Industri Kecil Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo. Dimana hasilnya membuktikan bahwa upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan sudah memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi pengrajin batik, namun dampak baik tersebut belum merata dirasakan oleh seluruh pengrajin batik dikarenakan pembinaan dan pemberdayaan belum menyeluruh dilakukan kepada semua pengrajin batik di Kampoeng Batik Jetis. Menurut Undang-Undang Nomor



20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun pembinaan yang dilakukan, yaitu pembinaan pengembangan sumber daya manusia, dan pembinaan peningkatan kemampuan teknologi. Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan, yaitu berupa pelatihan desain dan motivasi kewirausahaan akan tetapi pembinaan tersebut belum menyeluruh dilakukan kepada pengrajin batik di Kampung Batik Jetis. Pembinaan peningkatan kemampuan teknologi yang berupa kemampuan teknologi dalam produksi batik dan kemampuan teknologi dalam pemasaran. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, yaitu fasilitasi akses permodalan dan pemasaran yang bekerja sama dengan Bank Jatim untuk masalah akses permodalan. Kemudian untuk memberikan fasilitasi pemasaran Diskoperindag dan ESDM mengadakan pameran, promosi dan misi dagang yang sudah berjalan dengan baik dan hasilnya cukup memuaskan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Kurniawati dkk., (2013) yang meneliti pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto, dimana hasilnya menemukan bahwa dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan telah



dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan pengrajin batik Jetis Sidoarjo oleh Diskoperindag dan ESDM?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan pengrajin batik oleh Diskoperindag dan ESDM terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM Batik Jetis Sidoarjo?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemberdayaan pengrajin batik Jetis Sidoarjo oleh Diskoperindag dan ESDM.
2. Untuk mendeskripsikan dampak pemberdayaan pengrajin batik oleh Diskoperindag dan ESDM terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM Batik Jetis Sidoarjo.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut:



1. Manfaat Teoritis

Memberikan wacana ilmu tentang fenomena UMKM yang sedang terjadi di kampung batik Jetis Sidoarjo.

2. Manfaat Praktis

a) Penelitian ini diharapkan membantu memberikan referensi ilmiah mengenai problematika UMKM yang sedang dihadapi.

b) Memberikan masukan tentang dampak positif dan negatif bagi Diskoperindag dan ESDM dan PBS dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM Batik Jetis Sidoarjo.

I.5 Kerangka Teori

I.5.1 Pemberdayaan

I.5.1.1 Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem



politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.¹ Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*) (Mardi Yatmo, 2000).

Menurut Marx, Fiedmann (2000) pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis.

1. Pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan.
2. Pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka.
3. Pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.

Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul(1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah



penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan (Sulistiyani, 2004:7). Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”, yang secara harafiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” kepada masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage*). Seperti halnya yang diungkapkan Moeljanto pengertian pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata “*empowerment*”, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat (Wahyuono, 2001:9). Selain itu, Jim Ife menyatakan bahwa “*empowerment aims to increase the power of disadvantaged*” (Huraerah, 2007:82). Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.



Friedman (1992:160), mendefinisikan pemberdayaan sebagai pendekatan alternatif untuk membangun inisiatif masyarakat, dimana negara berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan, memfasilitasi, dan mendukung. Sedangkan menurut Pranarka dan Moejato (1996:56-57), konsep pemberdayaan atau *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana yang adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat yang diberdayakan.

Menurut Parsons, et al. (1994), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrol atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (masyarakat/perorangan). Pemberdayaan merupakan serangkaian proses yang panjang (tidak seketika atau tidak langsung), agar mereka menjadi lebih berdaya. Selain itu, pemberdayaan sebagai proses menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pentahapan kegiatan atau mengubah masyarakat yang kurang berdaya atau belum berdaya menuju keberdayaan. Tujuan dari adanya pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Sulistiyani, 2004:80).

Menurut Parsons, et al. (1994) pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apabila pada kelompok sasaran dapat diamati atau menunjukkan indikator-indikator sebagai berikut:



- a) Akses (*access*), yaitu memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber daya.
- b) Daya pengungkit (*everage*), yaitu peningkatan dalam hal daya tawar kolektifnya.
- c) Pilihan-pilihan (*choices*), yaitu mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai pilihan.
- d) Status (*status*), yaitu peningkatan citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya.
- e) Kemampuan refleksi kritis (*critical reflection capability*), yaitu kemampuan menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah.
- f) Legitimasi (*legitimation*), yaitu memperoleh pengakuan ahli yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan masyarakat.
- g) Disiplin (*discipline*), yaitu menetapkan sendiri standar mutu terhadap pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain.
- h) Persepsi kreatif (*creative perceptions*), yaitu sebuah pandangan yang positif dan inovatif terhadap hubungannya dengan lingkungannya.

Sedangkan dalam konteks pemberdayaan menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) dinyatakan bahwa terdapat empat indikator pemberdayaan.



1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Sumodiningrat (2002) menyatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah.

Sedangkan secara konseptual, pemberdayaan mencakup enam hal yang merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan kontinou sehingga pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat. Keenam hal tersebut antara lain sebagai berikut:



- a) *Learning by doing*. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus-menerus, yang dampaknya dapat terlihat
- b) *Problem solving*. Artinya, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- c) *Self evaluation*. Artinya, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- d) *Self development and coordination*. Artinya, pemberdayaan harus mampu mendorong terjadinya pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara mandiri dan lebih luas.
- e) *Self selection*. Artinya, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan (Huraerah, 2007:86).

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan pemberdayaan yaitu pengembangan kemandirian (*self development*) dan meningkatkan kekuasaan/kemampuan. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya menurut Gunawan Sumodiningrat (2002), maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, diantaranya kecenderungan primer dan sekunder.

1. Kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau



kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material yang mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

2. Kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Proses pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan derajat keberdayaan masyarakat sampai pada tingkatan yang optimal. Keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti (2002), dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*).
2. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
3. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri, dan lingkungannya.
4. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.



5. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Hal tersebut dapat terlihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan (Huraerah, 2007:90).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community based resources*) yang merupakan mekanisme perencanaan manusia dan menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program (Wahyuono, 2001). Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam hal ini bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain).

Sekarang bagaimana dengan konsep pemberdayaan ini dikalangan birokrasi pemerintah. Walaupun urian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah. Dari berbagai tulisan Sumodiningrat (1999) konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah



bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.



5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan secara umum adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM. Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.



Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan UMKM merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan menumbuhkan dan mengembangkan sektor usaha kecil. Pemberdayaan UMKM yang ideal haruslah mudah diterima (*acceptable*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), memberikan manfaat dan insentif (*profitable*), berkesinambungan (*sustainable*), dan mudah digulirkan untuk dikembangkan (*repllicable*).

I.5.1.2 Model Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat disamakan dengan keberhasilan usaha. Artinya, tolak ukur pemberdayaan UMK dapat disamakan dengan tolak ukur keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dapat diukur dari berbagai segi, diantaranya dari laba usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan usaha juga diidentikkan dengan perkembangan perusahaan, yaitu proses peningkatan kuantitas dan dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah penambahan karyawan, peningkatan aset, omzet penjualan, dan lain-lain (Zarkasyi, 2008:41-45).

Menurut PERMAC dalam Setiawan (2007), secara umum UMKM mempunyai kebutuhan yang hampir sama, yaitu:

1. Bantuan dan solusi akan masalah internal yang dihadapi.
2. Bantuan peningkatan produktifitas dan persaingan usaha.



3. Akses yang mudah kepada penggunaan teknologi yang efektif dan efisien.
4. Akses yang mudah kepada penggunaan manajemen bisnis yang lebih baik.
5. Akses yang mudah kepada pemasaran dan penggunaan teknik pemasaran yang lebih baik.
6. Peningkatan mutu SDM.
7. Peningkatan sumber-sumber daya dan input

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan. Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), secara umum memiliki kemiripan dimenasi pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendamping eksitu.



1. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja

Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama. Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini



tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi *kere*. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Sistem atau kebijakan yang kondusif untuk memperluas akses usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ke lembaga keuangan, sebenarnya sudah cukup banyak, seperti Kredit Usaha



Tani (KUT), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KMK-BPR), Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Trans Kawasan Timur (KKPA PIR Trans KRI), KKPA- Bagi Hasil, Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM), Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM), dan masih banyak lagi lainnya.

Affirmative action untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalau pun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan



ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah



pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. Pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil. Pada tahun 80-an ada NGO besar di Jakarta yang pernah memiliki dampungan kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu kelompok usaha bersama. Ketika kelompok tersebut didampingi oleh fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, aktivitas ekonomi melalui kelompok berjalan cukup baik. Tetapi ketika ditinggalkan pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-kelompok ini akhirnya bubar.

Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan ekonomi, perlu didefinisikan kembali. Kalau pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau



pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis.

Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.



I.5.1.3 Teori Pemberdayaan UMKM

Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Dalam hal ini, lebih banyak menitikberatkan pada metode bottom up dimana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan UMKM dan dilakukan secara partisipatif. Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat, langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu (1) identifikasi potensi, (2) analisis kebutuhan, (3) rencana kerja bersama, (4) pelaksanaan, dan (5) monitoring dan evaluasi. Kelima langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik sumber daya manusia (SDM) UMKM dan lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam (SDA) khususnya yang terkait dengan usahanya maupun lingkungan eksternal usaha. Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan, potensi wilayahnya masing-masing dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya manifestasi kebutuhan UMKM selaku individu pengusaha maupun sebagai anggota kelompok.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Lebih lanjut



dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tertuang jelas bahwa pemberdayaan UMKM memiliki beberapa tujuan yang terdiri dari:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dengan adanya hal itu, pemberdayaan UMKM sangatlah penting untuk dilaksanakan. Jadi, pendekatan pemberdayaan UMKM menekankan titik beratnya pada pentingnya UMKM yang mandiri sebagai system yang mengorganisir diri mereka sendiri. Sebagaimana proses pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan UMKM juga tidak jauh lagi berbeda dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan UMKM sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih difokuskan kepada upaya-upaya yang membuat pelaku-pelaku UMKM agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Prinsip pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 4 adalah sebagai berikut:



- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 14 yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu dalam bentuk: (1) Fasilitasi permodalan, (2) Dukungan kemu-dahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi, (3) Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (4) Pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar, (5) Pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah, (6) Fasilitasi HAK.

Dalam pengembangan usaha kecil perlu adanya sinergisitas dengan usaha besar agar usaha kecil tetap dapat bertahan. Menurut Soeharto



Prawirokusumo (2001: 115), salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan kualitatif UKM adalah melakukan sinergi dengan Usaha Besar (UB) dalam bentuk:

1. Subkontrak (UB) kepada UKM baik dalam hal *internal service* maupun kegiatan produksi dan distribusinya. Selanjutnya UKM akan tumbuh lebih cepat dan terjadi pemerataan usaha dan kekayaan,
2. Kemitraan inti-plasma franchising, vendor, dan kegiatan lain,
3. Restrukturisasi UB lewat *outsourcing, spin-off, management buy outs and tradeoff*,
4. *Transferring* pengalaman dan *knowhow* dari UB,
5. Pelatihan dan pendidikan pada UKM,
6. Pengembangan usaha dan pembangunan daerah lewat program-program inkubator dan *technology park* oleh UB.

Pendekatan Pemberdayaan Usaha Kecil tentang pengembangan usaha serta Pembiayaan dan Penjaminan dari UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, ada tiga hal yang dapat digunakan sebagai pendekatan utama dalam pemberdayaan usaha kecil.

1. Penumbuhan iklim usaha melalui pembinaan dan pengembangan

Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan usaha seluas-luasnya. Iklim usaha ditumbuhkan pemerintah melalui penetapan



peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

2. Pengembangan

Pengembangan dilakukan pemerintah untuk menguatkan usaha kecil dan menengah dengan memberikan fasilitas agar usaha tersebut dapat berkembang dan dapat menjadi usaha tangguh dan mandiri. Fasilitas yang diberikan seperti dalam bidang: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi.

3. Pembiayaan dan Penjaminan

Pembiayaan berupa pemberian pinjaman, hibah dan pembiayaan lainnya. Dan dapat juga berupa pemberian intensif dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk kemudahan persyaratan perijinan, keringanan tarif sarana dan prasarana atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro kecil

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehubungan dengan hal



tersebut, maka dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM perlu diberdayakan melalui cara berikut ini:

1. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehingga dapat diketahui bahwa salah satu upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan kepada UMKM adalah melalui adanya pembinaan. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu (Thoah, 2008:207). Menurut Hidayat dalam Kumalasari dkk (2014) pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana, teratur dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan dan pengarahan, bimbingan, pengembangan, stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil, pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.



Menurut Widjaja (2002), pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya, sedangkan menurut Rasyid et al., (2002) pembinaan didefinisikan sebagai suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya.

Menurut Mangunhardjono dalam Kumalasari dkk (2014) pembinaan memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan
2. Perubahan dan pengembangan sikap, dan
3. Latihan dan pengembangan tentang kecakapan dan keterampilan

Selain beberapa fungsi tersebut, pembinaan juga memiliki beberapa tujuan seperti yang dikemukakan oleh Mangunhardjono dalam Kumalasari dkk (2014). Adapun tujuan dalam pembinaan adalah:

1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya
2. Menganalisis situasi hidup dan kerjanya dari segala segi positif dan negatifnya
3. Mencari masalah hidup dan masalah dalam kerjanya
4. Mencari hal yang sebaiknya diubah dan diperbaiki



5. Merencanakan sasaran dan program dalam hidup dan kerjanya setelah mengikuti pembinaan.

Dengan adanya pembinaan, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka dapat. Pembinaan merupakan suatu cara seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Menurut Hidayat (2001), sasaran dari pembinaan usaha kecil adalah untuk mengembangkan usaha kecil menjadi usaha besar. Selain itu, terdapat dua aspek pembinaan usaha kecil yaitu:

1. Sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan usaha sendiri atau dari dorongan pihak luar.
2. Pengelolaan dalam arti praktek bisnis yang terdiri dari beberapa hal yang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil, pembinaan dan pengembangan usaha kecil dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
2. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan



pengembangan bagi usaha kecil.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran dapat dilaksanakan dengan:

1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
3. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar
4. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi
5. Memasarkan produk usaha kecil
6. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran.
7. Menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil.
8. Memberikan peluang pasar

I.5.2 Kesejahteraan Sosial

I.5.2.1 Dimensi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi yaitu, kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu adalah suatu cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan-pilihan obyektif untuk kehidupan pribadinya. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat (Badrudin, 2012). Kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan



sumber daya lainnya. Ketiga sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sejak akhir abad ke-20, pembangunan ekonomi telah mengalami pergeseran makna dimana muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan pertumbuhan GNP setinggi-tingginya, akan tetapi penghapusan atau pengurangan angka kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Dari pemaparan ini, dapat dikatakan bahwa untuk mengukur keberhasilan pembangunan, tidak cukup jika hanya menggunakan tolok ukur ekonomi saja, melainkan juga harus diimbangi dengan aspek-aspek sosial (non ekonomi) antara lain seperti tingkat pendidikan, kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, angka melek huruf, kecukupan kebutuhan perumahan, dan lain sebagainya.

Menurut Dunhan (1965:6) dalam Kartono (2007:104) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standart-standart kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Suharto (2006:3) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial,



masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Menurut Durham dalam Suud (2006:7) kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Sedangkan Segal dan Brzuzy dalam Suud (2006:5) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.

Selanjutnya, Amartya Sen memaparkan bahwa *Welfare Economic* merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari berbagai ukuran, seperti tingkat kehidupan (*level of living*), pemenuhan



kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*), dan pembangunan manusia (*human development*). Menurut UU No 11 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Amartya Sen, 2001:11).

Adapun pengertian kesejahteraan menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Menurut Dwi Heru Sukoco (1995), kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas hidup.
2. Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat (Zastrow, 2000).
3. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2005).



4. Salah satu ciri ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat (Adi, 1994:3-5).
5. Khan (dalam Sumarnonugroho, 1987:28-35) kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Dari beberapa definisi tentang kesejahteraan sosial, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tindakan yang mengarah kepada kondisi sosial masyarakat yang menjamin kehidupan masyarakat dalam lingkungan untuk hidup dengan rasa nyaman, aman, dan tenteram untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Segala upaya pembangunan, baik di negara maju maupun negara berkembang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak cukup jika hanya diukur dari aspek ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan, konsumsi, aset



dan aspek ekonomi lain, akan tetapi harus diperhatikan juga aspek kehidupan sosialnya.

Pemaparan tentang kesejahteraan masyarakat tidak akan lengkap apabila tidak dibarengi oleh penjabaran indikator-indikator kesejahteraan masyarakat, karena dari indikator ini dapat dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta sebagai salah satu tolok ukur kinerja pembangunan. Untuk menilai, mengukur dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, maka peneliti akan memaparkan beberapa pandangan para ahli tentang indikator penilaian kesejahteraan masyarakat. Tjokrowinoto menjelaskan indikator kesejahteraan sosial Indonesia yang kemudian disebut sebagai indikator kesejahteraan rakyat, mencakup 6 komponen utama, yaitu:

1. Penduduk keluarga berencana dan migrasi
2. Pendidikan dan sosial budaya
3. Kesehatan, gizi dan pengeluaran/ konsumsi rumah tangga
4. Angkatan kerja
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat
6. Perumahan dan lingkungan hidup (Tjokrowinoto, 2001:119).

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik menyebutkan 8 indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau pengeluaran keluarga
3. Keadaan tempat tinggal



4. Fasilitas tempat tinggal
5. Kesehatan anggota keluarga
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
7. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. (Badan Pusat Statistik, 2001)

Berbeda dengan pandangan para pakar pada umumnya, *World Bank* menerjemahkan kesejahteraan dengan menggunakan konsumsi karena lebih praktis dan akurat dalam hal memperoleh data. Ukuran yang digunakan *World Bank*, antara lain: (1) konsumsi kalori per hari, dimana jumlah minimum kalori yaitu 2100 kalori per orang per hari, (2) konsumsi pangan sebagai bagian dari pengeluaran total, dan (3) pengukuran hasil melalui *input*. Pangan sebagai *input* tetapi status gizi sebagai *output* sehingga ukuran kemiskinan dengan melihat kekurangan gizi. (Diola dalam Elvira, 2013:62).

Berdasarkan beberapa teori serta pandangan para pakar mengenai kesejahteraan masyarakat serta berbagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, maka peneliti menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat dari Badan Pusat Statistik untuk mengukur tingkat kesejahteraan pengrajin batik Jetis. Beberapa indikator pada penelitian ini dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang di tempat penelitian. Indikator yang digunakan yaitu tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kepemilikan dan penguasaan aset, tingkat pengeluaran konsumsi, tingkat kesehatan masyarakat, dan tingkat pendidikan.



I.5.2.2 Karakteristik Kesejahteraan Sosial

Ada empat karakteristik kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pertama*, meskipun telah banyak upaya kita selama ini, tetapi pasokan sumber daya dan energi kita tidak sanggup untuk memenuhi permintaan. Memang ada peningkatan anggaran untuk memenuhi kewajiban negara atas perawatan bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Kedua, usia harapan hidup penduduk semakin panjang sehingga semakin banyak perawatan yang diperlukan. Ketiga, kita juga mengetahui bahwa semakin banyak “*care seekers*” usia muda (misal, anak dengan disabilitas, remaja/dewasa dalam kondisi problematika). Pada saat bersamaan ada “*dejuvenation*”, yang berarti jumlah orang muda produktif sedang menurun. Keempat, masyarakat kita dicirikan oleh keberbagaian budaya (multiculturalism). Domain kebijakan kesejahteraan sosial mempertimbangkan hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan (provision) maupun dalam kebijakan sumber daya manusia. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah domain pemerintah, tetapi memungkinkan dilakukan penyesuaian dalam implementasinya berdasarkan kondisi setempat. Maka menyambungkan penawaran dan permintaan yang berimbang antara pusat dan daerah harus menjadi tujuan kita bersama.

I.5.3 Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah usaha produktif milik



orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.



Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.

Karakteristik usaha kecil menurut Soeharto Prawirokusumo (2010: 48-49).

1. Usaha kecil biasanya dikelola oleh pemiliknya sehingga disebut *owner-manager* yang biasanya bertindak sebagai pimpinan yang memberikan arah kepada beberapa staf yang tidak terlalu banyak dan tidak berspesialisasi untuk menjalankan usaha. Mereka disebut *management team* yang biasanya berasal dari anggota keluarga, sanak saudara atau teman dekat.
2. Usaha kecil biasanya hanya mempunyai *single product line* tidak diversifikasi usaha. Volume usaha relatif kecil.
3. Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang oleh satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang lain.
4. Hubungan antara *management* dengan pekerjaannya bersifat sangat dekat.
5. Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi fungsional.
6. Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat.
7. Kurang mempunyai *long term planning*.
8. Biasanya tidak *go public*.
9. Lebih berorientasi kepada *survival* untuk menjaga *owner's equity* dari pada *profit maximumisasi*.
10. Tidak dominan dalam pasar.



I.5.4 Dampak Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government*, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (*civil society*). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Setiap kebijakan/program yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu akan menimbulkan suatu dampak, baik dampak positif yaitu dampak yang diharapkan dapat membawa perubahan dan manfaat yang berguna bagi sasaran kebijakan, maupun dampak negatif yang tidak diharapkan terjadi. Dampak sendiri diartikan sebagai keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye dalam Tarigan, 2005:3).

Secara teoritis dampak (*Impact*) berbeda dengan hasil keluaran kebijakan (*output*). *Output* kebijakan merupakan produk, *direct service*, atau sumber daya yang dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran kebijakan. Sementara *Impact* kebijakan merupakan perubahan nyata yang



terjadi pada tingkah laku atau sikap kelompok sasaran yang direncanakan dapat dirubah melalui *output* kebijakan tersebut (Dunn William, 1999:513). *Impact* suatu kebijakan/ program sendiri dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, sifat perubahan yang dibawanya juga bervariasi pada skala yang berbeda dan bertahap pada kelompok sasaran (Johnson, 2004:35).

Anderson menyatakan bahwa, semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. *Output* kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik (dalam Tarigan, 2005:3).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dampak merupakan sesuatu hal yang berbeda dengan keluaran kebijakan. Untuk itu dalam menilai suatu dampak kebijakan/ program penting untuk mengukur manfaat dalam bentuk perubahan dalam lingkungan yang terkait tidak hanya mengukur aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah semata. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Anderson, yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat



kebijakan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dampak (dalam Tarigan, 2005:4).

Evaluasi dampak pada umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan efektivitas sebuah kebijakan/ program terhadap permasalahan yang diintervensi. evaluasi tersebut antara lain bertujuan untuk:

- a) Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, dan lembaga
- b) Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program
- c) Mengeksplor apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun negatif
- d) Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran betul – betul disebabkan oleh adanya program tersebut atau karena faktor lain (Wahyuni, 2011:280).

Evaluasi dampak pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara. Di samping tujuan evaluasi, terdapat dimensi dampak yang juga perlu untuk diperhatikan dalam proses evaluasi. Menurut thomas R. Dye, dimensi dampak kebijakan antara lain menggambarkan mengenai:

- a) *The Impact in target situations or group.* (dampak positif dan negatif pada situasi atau kelompok sasaran)
- b) *The Impact on situations or groups other than target* (dampak pada situasi atau kelompok selain target/ *spillover effect*)



- c) *Its Impact on future as well as immediate conditions* (dampak pada kondisi masa kini dan masa yang akan datang)
- d) *Its direct cost, in term of resources devote to the program* (dampak pada biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program – program kebijakan)
- e) *Its indirect cost, including loss of opportunities to do other things* (biaya tidak langsung yang ditanggung akibat adanya kebijakan tersebut, termasuk hilangnya kesempatan untuk melakukan hal-hal lain) (Winarno, 2012:235-238).

Selanjutnya, hal lain yang perlu diperhatikan dalam memantau *Impact* suatu kebijakan yaitu kelompok sasaran kebijakan (*target groups*) yang terdiri atas individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh kebijakan atau program tertentu. Selain itu harus diperhatikan pula kelompok penerima (*benefeciaries*) yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut.

Dari berbagai pemaparan mengenai dampak program di atas, yang dimaksud dampak program dalam penelitian ini yaitu, suatu perubahan nyata yang terjadi pada tingkah laku atau sikap kelompok sasaran yang direncanakan dapat dirubah melalui adanya suatu intervensi kebijakan atau program. Dalam penelitian ini yang ingin diketahui yaitu dampak yang dihasilkan dari pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik Kampoeng Batik Jetis oleh Diskoperindag dan ESDM Sidoarjo.



I.5.5 Dampak Kesejahteraan UMKM

Kebalnya UMKM dari efek krisis ekonomi 1997 secara tidak langsung telah menyatakan pada bangsa Indonesia bahwa yang perlu ditingkatkan dalam menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia melalui perbaikan kesejahteraan UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan cara yang paling efektif dalam melakukan perbaikan UMKM ini. Memperbaiki kesejahteraan UMKM merupakan isu utama yang harus diusung dalam membangun perekonomian bangsa.

Analisis dampak kebijakan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mempengaruhi dan merubah kelompok sasaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Rossi dan Freeman yang menyatakan bahwa analisis pengukuran dampak berfungsi untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Lebih lanjut hal ini dilakukan untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi atau perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga berpengaruh pada perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dianalisis tersebut (dalam Dunn William, 1999:604).

Pengukuran dan penilaian (evaluasi) dampak dari implementasi suatu program perlu dilakukan guna mengukur pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan, hal ini juga berguna dalam memberikan umpan balik berupa kontribusi/ rekomendasi dalam pembuatan keputusan program



dan perbaikan program di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap dampak dapat memberikan sumbangan dalam memperbaiki efektivitas program dengan memberikan rekomendasi sekitar: (i) pencapaian tujuan, (ii) perubahan dampak secara simultan, (iii) variasi dampak di antara kelompok penerima manfaat yang berbeda, serta (iv) efektivitas program dibandingkan dengan program alternatif.

Lebih lanjut, penelitian mengenai dampak dampak biasanya lebih mengarah kepada pengukuran sejauh mana suatu program dapat menyebabkan perubahan sesuai yang dikehendaki (*intended Impacts*). Tujuannya adalah untuk menguji efektivitas suatu kebijakan/ program dalam pencapaian program tersebut (Widodo, 2006).

Pengukuran mengenai dampak suatu kebijakan, pada dasarnya menggunakan metode komparatif untuk membandingkan beberapa kondisi, seperti kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi kebijakan/ program, membandingkan dampak antara intervensi terhadap suatu kelompok sasaran dengan kelompok lain, maupun membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang mungkin terjadi tanpa adanya intervensi kebijakan tersebut (Parsons, 2004:553).

Cook and Campbell mendeskripsikan metode evaluasi dampak *before and after design methods*, yang berfungsi untuk mengetahui suatu perubahan yang terjadi akibat adanya intervensi suatu program. Teori ini melibatkan beberapa perubahan yang terjadi dalam suatu objek dengan mengamati suatu komponen kemudian membandingkannya (Cook, 1979).



“...in design terminology, “before” refers to a measurement being made before an intervention is introduced to a group and “after” refers to a measurement being made after its introduction. Equivalent terms for “before” and “after” are “pre” and “post”

Pendekatan *before* and *after* approach ini dilakukan dengan menganalisa kondisi terakhir sebelum pelaksanaan program dan kondisi terakhir selama pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan *range* waktu yang terjauh agar dapat mendeteksi adanya perubahan data yang cukup signifikan.

Berdasarkan informasi dari bagan tersebut, maka dalam penelitian ini difokuskan pada pengukuran dampak jangka pendek berupa *outcome* dan dampak jangka panjang berupa *Impact* atas pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai. Kemudian metode pengukuran dampak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik komparasi antara kondisi sebelum dan sesudah munculnya intervensi kebijakan/ program.

Pada penelitian ini dampak kebijakan yang ingin diteliti, yaitu pada program pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik Kampoeng Batik Jetis. Manfaat yang dihasilkan dari pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik Kampoeng Batik Jetis yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan serta motivasi yang lebih tinggi untuk terus mengembangkan usahanya. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari pembinaan dan pemberdayaan yaitu pemasaran semakin meluas, desain yang semakin inovatif, meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk yang semakin bagus.



Manfaat yang dihasilkan dari pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik Kampoeng Batik Jetis yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan serta motivasi yang lebih tinggi untuk terus mengembangkan usahanya. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari pembinaan dan pemberdayaan yaitu pemasaran semakin meluas, desain yang semakin inovatif, meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk yang semakin bagus.

I.6 Definisi Konsep

Adapun teori-teori yang digunakan sesuai konteks permasalahan penelitian ini antara lain:

1. Pemberdayaan adalah proses mendayagunakan aspek tertentu dalam diri seseorang baik orang/personal, kelompok atau organisasi agar mampu mengapresiasi apa yang dimilikinya secara mandiri dan berkembang dalam diri dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.
2. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.



3. Pemberdayaan UMKM adalah alternatif upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan para pengrajin batik di Batik Jetis Sidoarjo.
4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi sejahtera dari masyarakat akibat dari adanya proses atau sistem yang terorganisir oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup yang memuaskan.
5. Kesejahteraan UMKM adalah suatu tindakan yang mengarah kepada kondisi sosial kelompok UMKM pengrajin batik dalam lingkungannya untuk hidup dengan rasa nyaman, aman, dan tenteram untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
6. Dampak kesejahteraan UMKM yaitu peningkatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pengerajin Batik Jetis yaitu dari kegiatan fisik maupun non fisik memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat antara lain dalam peningkatan perekonomian dapat membuka usaha baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pengerajin Batik Jetis.

I.7 Metode dan Prosedur Penelitian

I.7.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penekanan pada analisis



dari proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong. J. Lexy, 2006:3). Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati kedua belah pihak, yaitu peneliti dan subjek penelitian.

Fokus penelitian ini adalah peran Disperindagkop dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM Batik Jetis Sidoarjo.

I.7.2 Tipe Penelitian

Dalam rangka memahami dan mengkaji tentang peran Diskoperindag dan ESDM dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM batik Jetis Sidoarjo secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang diskriptif analisis diharapkan akan menghasilkan sebuah penelitian dan data yang lebih menyeluruh dan kontekstual sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan seperti



terjadi penurunan jumlah pengrajin batik Jetis Sidoarjo. Adapun ciri-ciri utama dari penelitian deskriptif yaitu memusatkan diri pada masalah yang ada pada waktu sekarang atau kontemporer. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan, dijelaskan dan pada tahap berikutnya dilakukan penganalisisan data.

I.7.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian survei yang bersifat deskriptif. Menurut Irawan (2007:101), metode deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan (korelasional) antara dua atau lebih variabel.

I.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Dusun Jetis, Sidoarjo, Jawa Timur. Jetis merupakan salah satu kampung tertua di Sidoarjo dan masih menjadi tempat pembuatan batik sampai sekarang. Jetis terletak di tengah kota Sidoarjo. Tepatnya di jalan Gajahmada, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo kota, Kabupaten Sidoarjo. Objek yang diteliti adalah Diskoperindag dan ESDM dan pengrajin batik Jetis yang menjadi anggota dari Paguyuban Batik Tulis Sidoarjo (PBS). Selain itu potensi yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Desa Jetis, Sidoarjo yang mayoritas berprofesi sebagai pengrajin batik. Sampai saat ini, Jetis merupakan satu-satunya tempat pembuatan batik tulis yang masih eksis dari masa ke masa. Ironisnya



hal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan para pengrajinnya. Terjadi penurunan jumlah pengrajin batik yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Berangkat dari hal tersebut penentuan lokasi penelitian juga berdasarkan pada asumsi yang dibangun oleh peneliti. Dalam melakukan aktivitas penelitiannya, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap informan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh informasi jelas dan detail mengenai perkembangan UMKM pengrajin Batik Jetis serta peran dan strategi yang dipakai Diskoperindag dan ESDM dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi pengrajin batik guna meningkatkan kesejahteraan.

I.7.5 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penentuan informan, peneliti memilih *purposive sampling* (sampel bertujuan) di mana pengambilan sampel sumber data karena pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini tak terlepas dari informan yang diharapkan oleh peneliti, yakni orang-orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan atau orang yang mempunyai pengaruh pada kelompoknya sehingga informasi yang digali peneliti bisa lebih dalam. Peneliti memilih teknik ini didasari dengan alasan agar penelitian yang telah dilakukan tidak jauh keluar dari fokusnya. Informan yang telah dipilih melalui *purposive sampling* memiliki kapabilitas dan juga informasi. *Purposive sampling* berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat



yang ada populasi yang sudah ditentukan sebelumnya sehingga diperlukan seleksi untuk memilih informan. (Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu, 1997:116). Sampel informan dipilih berdasarkan pertimbangan informan tersebut mampu memberi informasi dan kapabilitas sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan informan berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan pada pra-survei dan observasi di lapangan. Sebagai sumber data dari aktor-aktor yang terkait dengan fokus penelitian, Pada dasarnya dalam *purposive sampling* digunakan karena unit analisis penelitian yang homogen. Penggunaan sampel sebagai sumber informasi dalam penelitian ini dihentikan ketika informasi yang diperoleh sudah tidak bervariasi lagi atau boleh dikatakan sudah mengalami kejenuhan. Pemilihan informan sebagai data primer dalam penelitian ini didasarkan pada aktor yang terkait dalam batik tulis di Jetis, Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Zainal Afandi, selaku Pengrajin batik Jetis Sidoarjo.
2. Ibu Astri Kunto, selaku Pengrajin batik Jetis Sidoarjo.
3. Bapak H. Miftah, selaku Pengrajin batik Jetis Sidoarjo.
4. Bapak Nurul Huda, selaku Ketua Paguyuban Batik Sidoarjo.
5. Ibu Listyaningsih, selaku Kasi Perdagangan Dalam & Luar Negeri (Dinas Perdagangan).
6. Ibu Yayuk P. Rahayu, selaku Kabid Perindustrian (Dinas Perindustrian).



I.7.6 Instrumen Penelitian

Arikunto (2006:160) instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah panduan wawancara.

Data tersebut harus relevan, berkaitan dan sesuai. Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu data primer yang merupakan data dari tangan pertama dan data sekunder yang merupakan data dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya (Marzuki, 2000:55).

1. Data Primer

Data Primer didapat melalui wawancara mendalam (*depth Interview*) dengan para informan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:231). Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2014:232).

Instrumen penelitian dengan sumber data primer diperoleh melalui panduan wawancara, dimana data yang akan dicari dengan mengacu parameter berikut ini:

- a. Adanya pemberdayaan
- b. Macam-macam pemberdayaan yang diberikan



- c. Pemberdayaan yang optimal
- d. Adanya pembinaan sebagai upaya pemberdayaan
- e. Macam-macam pembinaan yang diberikan
- f. Pembinaan yang optimal
- g. Fasilitasi Pemasaran
- h. Bentuk fasilitasi pemasaran
- i. Fasilitasi akses permodalan
- j. Bentuk fasilitasi akses permodalan
- k. Manfaat pemberdayaan
- l. Dampak pemberdayaan
- m. Peningkatan kesejahteraan
- n. Peningkatan omset
- o. Perbedaan sebelum dan sesudah pemberdayaan

Data primer juga dapat diperoleh melalui dokumentasi dengan foto yang langsung diambil oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tidak langsung yang diperoleh dari sumber tertulis seperti data monografi Kecamatan dan Peraturan Bupati. Selain data tersebut data sekunder juga dapat diperoleh melalui jurnal, skripsi, laporan hasil penelitian, artikel internet dan artikel media massa.



I.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti harus relevan dengan persoalan yang sedang dikaji. Lebih jauh menjelaskan data tersebut harus saling berkaitan dan tepat guna. Apabila data tersebut diperoleh tidak tepat dan sesuai maka akan menyebabkan kekeliruan dalam menyusun kesimpulan. Kesalahan dalam mengumpulkan data bisa merusak penelitian secara keseluruhan. Maka menjadi hal yang sangat penting bagi seorang peneliti untuk mengkresek dan memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan faktual sehingga interpretasi dan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berarti data yang ada pada penelitian kualitatif menunjukkan kualitas dari sesuatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan dikaji sebelum melakukan proses wawancara. Fungsi observasi bisa bermanfaat untuk mendeskripsikan lokasi, kondisi budaya dan keadaan masyarakat Jetis, khususnya di lingkungan Pengrajin batik Jetis. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih selama satu minggu. Pengamatan dilakukan langsung oleh peneliti dengan langsung datang ke kampung batik di Jetis. Dari



perbincangan tersebut peneliti mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini mengenai batik serta problematika yang sedang dialami oleh para pengrajin. Dari perbincangan tersebut juga peneliti mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan situasi pengrajin Jetis sebelum peneliti terjun lapangan lebih dalam untuk melakukan penelitian.

2. Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Cara ini ditempuh dengan wawancara secara mendalam terhadap sumber-sumber yang dinilai relevan dan berkompeten dengan masalah penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam proses pengumpulan data, dan proses wawancara yang bersifat terbuka. Dalam pelaksanaannya untuk menjaga agar wawancara terfokus pada permasalahan dari penelitian maka dibuat suatu daftar pertanyaan. daftar pertanyaan tersebut berupa *interview guide* (pedoman wawancara) yang berupa garis besar pokok pertanyaan yang dinyatakan dalam proses wawancara dan disusun sebelum wawancara dimulai. Namun, hal ini sifatnya tidak kaku, tetapi dapat berkembang sesuai dengan apa yang akan ditemukan di lapangan. Penelitian ini mendapatkan sumber data melalui wawancara terstruktur yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan. Sebelum melakukan wawancara peneliti melakukan *intermezzo* (obrolan santai) kepada beberapa informan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang akrab dan komunikatif sehingga ketika wawancara dilakukan didapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. *interview guide* (pedoman wawancara) yang memuat garis besar pertanyaan tidak bersifat



kaku dan dinamis sehingga mudah untuk dikembangkan. Peneliti juga menggunakan wawancara bebas untuk mendapatkan kekayaan informasi. Wawancara tersebut bersifat spontan, tidak bersifat kaku atas jawaban yang dikeluarkan oleh para informan. Jawaban informan tersebut dapat dikembangkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tema penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menggali data dengan menggunakan dokumen sebagai data yang dapat diperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam gambar. Selain itu, dokumentasi digunakan peneliti sebagai bukti ataupun sumber tambahan yang sifatnya sulit untuk didapatkan seperti foto, rekaman wawancara dan artikel batik yang berasal dari media cetak atau media elektronik. Selanjutnya Dokumen dapat berupa artikel-artikel relevan maupun dokumen resmi (data statistik, hasil laporan penelitian atau peristiwa tertulis lainnya.) untuk menambah informasi penelitian, peneliti juga menggunakan dokumen pemerintah yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Dokumen tersebut didapatkan melalui Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Diskoperindag dan ESDM.

I.7.8 Teknik Analisis Data

Analisa data meliputi pengorganisasian data, menguraikan data menjadi unit yang lebih kecil, melakukan sintesis di antara data, dan



akhirnya menentukan apa saja yang dilaporkan dan diinformasikan kepada masyarakat. analisis data juga bisa dikatakan sebagai proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan temuan-temuan yang ada di lapangan yang disertai dengan analisis untuk menafsirkan makna dibalik suatu kejadian yang dihubungkan dengan masalah penelitian. Idealnya analisa data dilakukan terus-menerus sejak awal dan selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang meliputi:

1. Reduksi Data

Peneliti yang telah mengumpulkan beragam data dengan melalui proses wawancara dan pengamatan terhadap pengrajin Batik Jetis kemudian mereduksi, mengelompokkan dan memilah data menjadi berbagai pokok bagian yang telah diidentifikasi yang selanjutnya dianalisa.

2. Display Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data (display data). Data-data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara kemudian dikonversi menjadi bentuk baru yang disajikan melalui tabel dan kalimat yang logis dan sistematis yang sesuai dengan temuan di lapangan.

3. Verifikasi Data

Data yang telah didapatkan peneliti dan telah melalui tahap pemilahan atau reduksi kemudian dipisah dan diambil hubungan antar data



yang sesuai dengan tema penelitian yakni Peran Disperindagkop terhadap UMKM pengrajin batik Jetis Sidoarjo yang kemudian dapat diambil satu kesimpulan. Dari data yang diperoleh, peneliti kemudian menarik sebuah kesimpulan. Dalam memperkuat kesimpulan dari penelitian, selanjutnya kesimpulan tersebut akan dikonfirmasi di lapangan selama penelitian berlangsung dan diverifikasi dengan mencari data pendukung baru yang dapat diuji tingkat validitasnya.

I.7.9 Teknik Keabsahan Data

Dalam menganalisis data, data yang diperoleh haruslah valid dan absah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pemeriksaan keabsahan data melalui, yaitu:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan proses analisa data yang sifatnya konstan atau tentatif (Moleong J.Lexy, 2006:329). Konsistensi berarti harus fokus kepada kajian yang diteliti dan tidak terpengaruh. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan secara cermat terhadap faktor-faktor penting terkait dengan penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Tujuan



triangulasi adalah guna memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data dengan beberapa sumber bahan tambahan yang lain. Tujuan triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya berdasarkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada beberapa fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan seringkali menggunakan metode yang berlainan. hal tersebut agar tidak terjadi kesamaan dalam pandangan, pendapat dan pemikiran.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah:

- a) Membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dari pengrajin batik Jetis sebagai anggota Paguyuban Batik Sidoarjo kepada Ketua Paguyuban Batik Sidoarjo sebagai aktor penggerak dan kegiatan Paguyuban dengan pengamatan di lapangan.
- b) Membandingkan informasi antara anggota paguyuban dengan ketua paguyuban, peneliti juga membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan sesama informan apakah memiliki persamaan atau perbedaan jawaban dengan menggunakan pertanyaan yang sama. Informasi yang yang dikumpulkan dari hasil pengamatan juga dibandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan. Dengan perbandingan ini peneliti dapat mengetahui apakah hasil waancara pada saat melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan mengalami perbedaan.



- c) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan misalnya masyarakat biasa, kalangan Pengrajin batik dan birokrat.

